

**EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR
(KIP) BAGI SISWA SMK DI KECAMATAN JERUKLEGI
KABUPATEN CILACAP (STUDI PERMENDIKBUD NO. 12
TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh:

SARAS SETYAWATI
NIM. 1323303044

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saras Setyawati

NIM : 1323303044

Jenjang : S1

Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

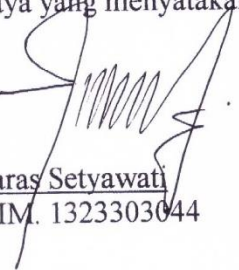
Judul Skripsi : Efektifitas Program Kartu Indonesia Pintar bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk dan sumbernya.

Purwokerto, 9 Januari 2018

Pada yang menyatakan,




Saras Setyawati
NIM. 1323303044

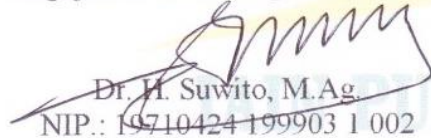
PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR BAGI SISWA SMK
DI KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP
(Studi Permendikbud No. 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar)

Yang disusun oleh : Saras Setyawati, NIM : 1323303044, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari : Kamis, tanggal : 18 Januari 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada sidang Dewan Penguji skripsi.

Penguji I/Ketua sidang/Pembimbing,



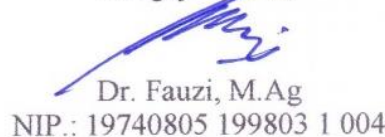
Dr. H. Suwito, M.Ag
NIP.: 19710424 199903 1 002

Penguji II/Sekretaris Sidang,



Yulian Purnama, S.Pd., M.Hum
NIP.: 19760710 200801 1 030

Penguji Utama,



Dr. Fauzi, M.Ag
NIP.: 19740805 199803 1 004

Mengetahui :
Dean,



Dr. Kholid Mawardi, S.Ag., M.Hum
NIP.: 19740228 199903 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan FTIK IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

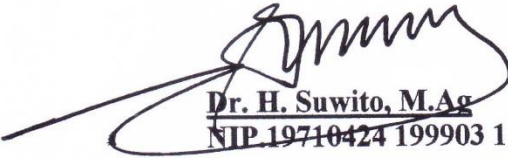
Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Saras Setyawati, NIM. 1323303020 yang berjudul :

Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada ketua IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 10 Januari 2018
Pembimbing


Dr. H. Suwito, M.Ag
NIP.19710424 199903 1 002

MOTTO

Hidup bagaikan sekolah, tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Setiap soal dalam ujian memerlukan jawaban, mempersoalkan persoalan adalah ciri dari orang yang tidak mampu menjawab persoalan.

(Mohammad NUH)



PERSEMBAHAN

Tiada cinta yang paling suci selain kasih sayang bapak dan mama

Setulus hatimu mama, searif arahanmu bapak

Do'amu hadirkan keridhaan untukku

Petuahmu tuntunkan jalanku, pelukmu berkahi hidupku

Diantara perjuangan dan tetesan do'a malammu

Dan sebaith do'a telah merangkul diriku menuju hari depan yang cerah

Kini diriku telah selesai dalam menyusun tugas akhirku

Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhaan-Mu ya Alloh

Ku persembahkan karya tulis ini untuk yang tercinta, tersayang serta termulia,

Mama Manis dan Bapak Paikun, Kangmasku Imam Bukhari, Mbaku

Maulidta Taftina, Adikku Naafiyani Septi Bahari dan Almh. Jannah

Halimatus Sa'diyah, dan Keponakanku tercinta Abhipraya Muhammad.

Terimakasih atas do'anya, cintanya, kasih sayangnya, dukungannya, semoga karya sederhana ini dapat mengobati beban kalian.

Terimakasih untuk segala cinta kasih pada setiap kurangku.

**EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) BAGI
SISWA SMK DI KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP
(STUDI PERMENDIKBUD NO. 12 TAHUN 2015 TENTANG
PROGRAM INDONESIA PINTAR)**

Oleh:
Saras Setyawati
NIM 1323303044

ABSTRAK

Program Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah terkait bantuan pembiayaan pendidikan yang diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) guna membantu terlaksananya pemerataan pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengukur tingkat efektivitas peneliti menggunakan konsep efektivitas menurut Ni Wayan Budiani.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa yang mendapat bantuan dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Populasi penelitian yaitu seluruh siswa SMK penerima bantuan Program Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Jeruklegi, Cilacap yaitu sejumlah 2 SMK yang terdiri dari 487 siswa. Adapun yang menjadi responden adalah 146 siswa. Guna menemukan responden penelitian secara representatif, maka dalam penelitian ini digunakan teknik *proportional random sampling*.

Hasil dari penelitian ini diketahui efektivitas program Kartu Indonesia Pintar bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap lebih dari 70%. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata sebesar 92,10 yang lebih besar dari 78,4 dan hasil uji t yang memiliki signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Terdapat beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas program Kartu Indonesia Pintar; 1) Informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online, 2) Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima KIP, 3) Adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana KIP, 4) Siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi. Adapun faktor penghambat: 1) Evaluasi program KIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya, 2) Penyelewengan dana KIP, 3) Kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.

Kata kunci: Efektivitas, Kebijakan Pendidikan, Program Kartu Indonesia Pintar

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.”

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia, yaitu agama Islam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan juga sebagai aplikasi dalam mengevaluasi kapasitas ilmiah dari mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di kelembagaan tersebut.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang sederhana ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Kholid Mawardi, S.Ag., M.Hum., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd., Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus Penasihat Akademik MPI A 2013.
4. Bapak H. Yuslam, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak Dr. H. M. H. Muflihini, M.Pd., Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Bapak Dr. H. Suwito, M.Ag., Dosen Pembimbing, yang senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Bapak Ag. Bambang Agus Mardoko, Kepala SMK Yos Sudarso dan Ibu Praptiwi, S.E., Kepala SMK Komputama, Bapak Heri Prabowo, ST, dan Bapak Kristianto, Amd, dan seluruh Bapak dan Ibu guru serta seluruh Staff Karyawan SMK di Jeruklegi Kabupaten Cilacap yang telah memberikan pelayanan dan data yang sesungguhnya kepada peneliti.
9. Sahabatku, Ragil (Warohmah, Lilis Fatimatur Rohmah, Khoerotunnida, Mulyani Sulistiani, Dwi Lusiani, dan Galuh Setia Wardhani), Lita Marlia,

Mba Halimah, Aqilatul Munawaroh, yang selalu memberikan do'a dan semangat.

10. Keluarga besar “Mitra Usaha” dan “Indocreative”, yang selalu memberikan dukungan, do'a dan restunya.

11. Keluarga besar Bapak Ali Nur Setiawan, S.Pd.I yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.

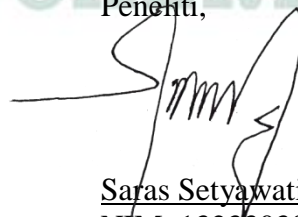
12. Teman-teman seperjuangan MPI-A angkatan 2013.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia dan nikmat-Nya pada kita semua. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritikan membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat lebih sempurna.

Akhirnya penulis selalu bersyukur kepada Allah SWT karena skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis sendiri khususnya.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 9 Januari 2018
Peneliti,



Saras Setyawati
NIM: 1323303044

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR RUMUS.....	XV
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Kebijakan Pendidikan.....	21

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan	21
2. Tujuan dan Manfaat Kebijakan Pendidikan.....	22
3. Komponen Kebijakan Pendidikan	26
B. Konsep Efektivitas	30
1. Pengertian Efektivitas	30
2. Efektivitas Program	33
C. Kemiskinan	35
D. Program Indonesia Pintar.....	39
1. Pengertian Program Indonesia Pintar	39
2. Sasaran Program Indonesia Pintar	39
3. Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar.....	40
4. Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar	41
5. Peran dan Fungsi Lembaga Pemerintah	44
E. Rumusan Hipotesis	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	50
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	50
D. Variabel Penelitian	52
E. Instrumen Penelitian	55
F. Teknik Pengumpulan Data	56
G. Teknik Penentuan Kualitas Instrumen.....	58
1. Validitas	58

2. Realibilitas	60
3. Normalitas.....	51
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	62
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Penyajian Data	66
B. Analisis Data.....	71
C. Pembahasan tentang Efektifitas Program Kartu Indonesia Pintar.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Perhitungan Sampel

Tabel 2 Kisi-kisi Instrumen Variabel Efektivitas Program

Tabel 3 Skoring Item Instrumen Positif

Tabel 4 Skoring Item Instrumen Negatif

Tabel 5 Hasil Uji Validitas

Tabel 6 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Efektivitas Program

Tabel 7 *Reliability Statistics*

Tabel 8 Hasil Uji Realibilitas

Tabel 9 Tabel Statistik Deskriptif

Tabel 10 Kategorisasi Efektivitas Program KIP

Tabel 11 Hasil Uji Normalitas

Tabel 12 Hasil Uji-t



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RUMUS

Rumus 1 Perhitungan Sampel

Rumus 2 Korelasi Product Moment

Rumus 3 Alpha Cronchbach

Rumus 4 Kolmogrov-Smirnov

Rumus 5 Frekuensi Relatif

Rumus 6 Uji t



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lampiran Kuesioner
- Lampiran 2 Lampiran SPSS Uji Validitas
- Lampiran 3 Lampiran Hasil Perhitungan Uji Validitas
- Lampiran 4 Lampiran Jawaban Responden
- Lampiran 5 Lampiran Hasil Kategorisasi Jawaban Responden
- Lampiran 6 Lampiran Dokumen Program Indonesia Pintar
- Lampiran 7 Surat-surat yang meliputi: surat keterangan validitas instrumen, surat permohonan ijin riset individual, surat keterangan telah melakukan riset, surat rekomendasi seminar proposal skripsi, surat keterangan telah seminar proposal skripsi, dan surat keterangan lulus ujian komprehensif
- Lampiran 8 Sertifikat yang meliputi: sertifikat OPAK, sertifikat pengembangan bahasa arab, sertifikat pengembangan bahasa inggris, sertifikat komputer, sertifikat BTA-PPI, sertifikat PKL, dan sertifikat KKN
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Pendidikan sebagai gejala yang universal, merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena disamping pendidikan sebagai gejala sekaligus juga sebagai upaya memanusiasiakan manusia itu sendiri. Dengan perkembangan kebudayaan manusia, timbullah tuntutan akan adanya pendidikan yang terselenggara lebih baik, lebih teratur dan didasarkan atas pemikiran yang matang. Manusia ingin lebih mempertanggungjawabkan caranya dia mendidik generasi penerusnya agar lebih berhasil dalam melaksanakan hidupnya, dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia serta dalam hubungannya dengan Tuhan.¹

Pendidikan merupakan pemotong mata rantai kemiskinan.² Melalui pendidikan yang mencukupi, seseorang dapat hidup dengan layak seperti yang diharapkan. Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupannya dan sekaligus untuk perbaikan nasib dan peradaban umat manusia.³ Tentunya harapan manusia di masa yang akan datang adalah hal yang baik, yaitu keadaan di mana kehidupan seseorang lebih baik dari keadaan

¹Dwi Siswoyo, dkk, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), hlm. 64-65

²Mohamad Nuh, *Menyemai Kreator Peradaban; Renungan Tentang Pendidikan, Agama, dan Budaya*, (Jakarta: Zaman, 2013), hlm. 27.

³Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, *Meretas Pendidikan Berkualitas dalam Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 1

sekarang. Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan sekaligus perubahan pola hidup kepada peserta didik. Mohammad Saroni dalam bukunya menyatakan bahwa pencerahan diperlukan sebagai satu usaha sadar untuk menjadikan kita sebagai sosok penting dalam kehidupan dan perubahan yang dimaksud adalah untuk mempersiapkan kita sebagai sosok yang mampu menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan.⁴

Menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat

(1) menyatakan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.⁵

Berdasarkan UU Sisdiknas tersebut diharapkan pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena merupakan faktor penentu suatu bangsa untuk bisa memenangkan kompetisi global.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya pasal 3 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah khususnya pasal 3 a bahwa “Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak

⁴Muhammad Saroni, *Pendidikan Untuk Orang Miskin; Membuka Keran Keadilan dalam Kesempatan Berpendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 9.

⁵Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

mampu menjadi tanggung jawab daerah”.⁶ Pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang serta Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali.

Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai.⁷ Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Masalah pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah krusial bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah. Mereka adalah masyarakat yang sering menjadi korban dari biaya pendidikan yang terus melangit. Mereka tidak mampu mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Hal ini tentu saja menjadikan mereka sebagai kelompok masyarakat yang dikecewakan oleh kondisi.⁸

Pada tahun 2003, angka partisipasi kasar (APK) SD/ sederajat sebesar 105,82%, meningkat hingga mencapai 107,71% pada tahun 2013. Untuk APK SMP/ sederajat sebesar 81,09% pada tahun 2003 dan sepuluh tahun kemudian

⁶Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

⁷Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009), hlm. 245.

⁸Muhammad Saroni, *Pendidikan...*, hlm. 27.

sebesar 85,96%. Setelah pencapaian target tersebut, pemerintah melakukan perluasan program dengan nama Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) dengan target APK untuk pendidikan menengah atau tingkat SMA/ sederajat pada tahun 2020 sebesar 97%. Sebagai gambaran pada tahun 2012/2013 APK pendidikan menengah (SMA/ sederajat) masih tertinggal diangka 78,7%. Untuk mencapai target tersebut pemerintah berkewajiban untuk menyediakan akses seluas luasnya dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat termasuk lulusan SMP/ sederajat agar dapat melanjutkan ke sekolah jenjang pendidikan menengah SMA sederajat. Salah satu perhatian pemerintah adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah (SMA/ sederajat).⁹

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar ini merupakan kelanjutan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan siswa/warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar (PKBM)/ lembaga kursus dan pelatihan dari rumah tangga/ keluarga dengan status ekonomi terendah secara nasional.¹⁰

⁹<https://www.bps.go.id> (Diakses pada 26 Mei 2017, Pukul 09.48 WIB)

¹⁰Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*, (Jakarta: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2015), hlm. 11.

Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui program Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya.

Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja.

Tujuan dari program Kartu Indonesia Pintar tersebut adalah untuk membantu siswa miskin memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka.¹¹ Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Program Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya.

¹¹Kemntrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*, (Jakarta: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2015), hlm. 12.

Dana bantuan ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Program Indonesia Pintar ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telah bergulir sejak tahun 2008.

Fenomena yang terjadi salah satunya adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana KIP serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP. Padahal seharusnya pemerintah meluncurkan program ini adalah diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan pendidikan yang sama. Fungsi dari dana KIP adalah pembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa/ iuran bulanan siswa, biaya kursus/les tambahan, keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah.

Masalah lain yang terjadi adalah sulitnya pengawasan yang dilakukan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa. Dana tersebut yang mengelola adalah orang tua siswa dan pihak sekolah hanya sebagai implementor sulit mengawasi penggunaan dana tersebut.

Sasaran BSM/PIP 2015 adalah sebanyak 17.920.270 peserta didik dengan rincian sebagai berikut:¹²

Jenjang Pendidikan	Sasaran BSM/PIP
SD/Paket A	10.470.610
SMP/Paket B	4.249.607
SMA/Paket C	1.353.515
SMK/Kursus dan Pelatihan	1.846.538
Jumlah	17.920.270

Target penerima Bantuan Siswa Miskin/ Program Indonesia Pintar untuk Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2015 seperti yang tertera pada tabel di atas adalah sebanyak 1.846.538 siswa miskin dengan besaran dana untuk satu tahun sebesar Rp 1.000.000,00 yang diberikan bertahap selama 2 semester.

Tujuan dari Program Indonesia Pintar antara lain:¹³

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/ Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

¹²Kemendikbud dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*, (Jakarta: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2015), hlm. 14.

¹³Kemendikbud dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*, (Jakarta: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2015), hlm.2.

3. Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/ Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)/ Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Berdasarkan Kebijakan Program dan Anggaran Pendidikan Menengah tahun 2015 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menyatakan isu strategis yaitu perluasan pendidikan menengah universal universal yang berkualitas.¹⁴Arah dari kebijakan ini yaitu untuk meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas dengan strategi pemihakan pada siswa yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Cilacap, masalah pendidikan cukup beragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, faktor ekonomi, sarana dan prasarana, dan kesadaran individu. Letak geografis Kabupaten Cilacap yang dekat dengan pesisir menjadi hal penting dalam faktor ekonomi. Kondisi pendidikan di daerah pesisir cenderung tertinggal dibandingkan dengan kondisi pendidikan di pusat kota Cilacap, karena kurang meratanya pembangunan di Kabupaten Cilacap.¹⁵

Dilihat dari segi ekonomi kebanyakan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah tidak dapat menikmati proses belajar mengajar yang

¹⁴Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Kebijakan Program dan Anggaran Pendidikan Menengah Tahun 2015*, (Jakarta:DIRJENDIKMEN, 2014), hlm.6.

¹⁵<https://cilacapkab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/166> (Diakses Pada 26 Mei 2017, Pukul 13.15 WIB)

kondusif. Hal itu diperkuat dengan data dari Profil Pendidikan Kabupaten Cilacap Tahun 2010 s/d 2015. Sebanyak 350.596 orang (20.05%) penduduk belum/tidak tamat SD, 138.689 orang (7,93%) belum /tidak pernah sekolah, dan yang tidak dapat membaca dan menulis sebanyak 180.307 (11,5 %).¹⁶

Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 (Sisdiknas, pasal 3), menyatakan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.¹⁷

Karena setiap warga negara juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Beberapa program Pemerintah turut berperan serta, Program tersebut seperti Program Indonesia Pintar yang termaktub dalam PERMENDIKBUD No. 12 Tahun 2015.

Secara umum tujuan Program KIP khususnya bagi siswa pada jenjang pendidikan menengah (SMA/ sederajat) adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung program wajar 12 Tahun. Se jauh mana program KIP dapat menopang kegiatan dalam rangka mewujudkan program wajib belajar 12 tahun, tentu hal ini bergantung kepada kepatuhan sekolah dalam

¹⁶<https://cilacapkab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/166> (Diakses Pada 26 Mei 2017, Pukul 13.15 WIB)

¹⁷Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

melaksanakan program KIP yang telah diatur dalam petunjuk teknis Program KIP tahun 2015, baik dari tujuan maupun peruntukannya.¹⁸

Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar dan memetik pelajaran dalam rangka perbaikan program ini, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai tingkat efektifitas kartu Indonesia pintar untuk siswa pada jenjang pendidikan SMK di wilayah kecamatan Jeruklegi ini terkait dengan tujuannya memberikan akses pendidikan pada anak usia 6 sampai 21 tahun agar mengurangi angka putus sekolah melalui bantuan dengan program kartu Indonesia pintar yang diberikan oleh pemerintah. Diharapkan dengan Program kartu Indonesia pintar yang efektif, maka angka putus sekolah dan kebutuhan pendidikan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

B. Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

1. Efektivitas Program

¹⁸Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Kebijakan Program...*, hlm.6.

Efektif adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya, semakin efektif organisasi tersebut.¹⁹

Untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:²⁰

- a. Ketepatan Sasaran Program
- b. Sosialisasi Program
- c. Tujuan Program
- d. Pemantauan Program.

Berdasarkan pernyataan di atas efektivitas yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah kegiatan yang selalu berorientasi pada pencapaian tujuan suatu program atau kebijakan dari organisasi. Organisasi dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yang tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai sendiri-sendiri. Jadi dengan organisasi sebagai alat itulah, orang atau orang-orang ingin mencapai tujuan. Dengan demikian, efektivitas merupakan keberhasilan organisasi dalam menjalankan program atau kebijakannya melalui berbagai sarana dan cara serta upaya memanfaatkan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta dalam mencapai ukuran efektivitas program atau kebijakan sebuah organisasi dapat menggunakan kriteria-kriteria di atas.

2. Program Indonesia Pintar

¹⁹Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 21.

²⁰Ni Wayan Budiani, 2007. "Efektivitas program penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", *INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial* Volume 2 Nomor 1, Bali: Universitas Udayana, hlm. 53.

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan.²¹

Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang mengamanatkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai penyempurnaan dari program sebelumnya yaitu Bantuan Siswa Miskin. Program Indonesia Pintar bertujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah dan mencegah atau menarik peserta didik putus sekolah.²²

Dalam hal ini peneliti akan lebih memfokuskan pada seberapa besar tingkat efektifitas Program Indonesia Pintar melalui pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar bagi siswa pada jenjang pendidikan SMK.

3. Jenjang Pendidikan SMK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab VI Pasal 13, menyatakan bahwa

²¹Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar

²²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*, (Jakarta: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2015), hlm. 2.

“Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang masing-masing jalur terdiri dari beberapa jenjang pendidikan”.²³ Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Bentuk satuan pendidikan menengah kejuruan di Indonesia adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada di bawah naungan Diknas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15, menjelaskan bahwa “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”.²⁴ Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu jenjang pendidikan yang menyiapkan lulusannya untuk memiliki keahlian tertentu sehingga dapat langsung terjun ke dunia kerja. SMK yang dimaksud peneliti disini adalah yang berada diwilayah Kecamatan Jeruklegi yaitu SMK Komputama Jeruklegi dan SMK Yos Sudarso Jeruklegi.

4. Permendikbud No. 12 Tahun 2015

²³Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

²⁴Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Merupakan peraturan yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan instruksi presiden No 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangunkeluarga produktif.

Program BSM/PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa untuk pemanfaatan sebagai berikut:²⁵

- a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah;
- b. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
- c. Transportasi siswa ke sekolah;
- d. Uang saku siswa ke sekolah;
- e. Biaya kursus/les tambahan.

Penerima BSM/PIP tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan, terlebih kegiatan yang menyimpang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap ?

²⁵Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*, (Jakarta: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2015), hlm. 23.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Suatu penelitian sudah tentu memiliki tujuan yang berfungsi sebagai pedoman, arah dan hasil yang akan dicapai dari penelitian. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.
- b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program kebijakan Kartu Indonesia Pintar bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini yaitu; untuk memberikan kontribusi secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis bahwa penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan khususnya pada ranah pendidikan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada bagaimana mengukur kemanfaatan sebuah kebijakan, sehingga dapat membangun serta mengembangkan konsep-konsep mengenai program-program pendidikan. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut program KIP bagi peserta didik.

E. Kajian Pustaka

Telaah pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi.²⁶ Telaah pustaka diperlukan untuk mencari teori-teori, konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan teoritis yang akan dilakukan. Landasan ini perlu ditegaskan agar suatu penelitian mempunyai dasar yang kokoh, dalam hal ini penulis menggunakan referensi yang ada kaitannya dengan judul skripsi.

Dengan telaah pustaka kita mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi penemuan-penemuan yang telah ada dan belum ada. Selain itu telaah pustaka juga memaparkan hasil penelitian terdahulu yang bisa menjadi referensi bagi kita dalam melakukan penelitian.

Adapun hasil penelitian yang ada relevansinya dengan judul yang penulis angkat yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hasbi Iqbal.²⁷ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan program bantuan langsung tunai di Kabupaten Kudus adalah sikap pelaksana program yang kurang baik, kondisi sosial ekonomi yang hampir sama menimbulkan kecemburuan sosial, situasi politik yang mendukung dan menolak program, ketrampilan pelaksana program yang masih perlu ditingkatkan, dan kordinasi antar kelompok yang masih perlu dilegalkan.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.75.

²⁷Hasbi Iqbal, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus*, (Tesis) (Semarang: UNDIP, 2008)

Kedua, penelitian yang dilakukan Sri Esnawati.²⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dilihat dari sasaran, mekanisme pengusulan, pengambilan dana, pemanfaatan dana, dan tugas dan tanggung jawab, serta faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran BSM di SMP N 15 Yogyakarta adalah siswa yang memiliki Kartu BSM sebanyak 15 siswa. Mekanisme pengusulan dimulai dari siswa menyerahkan Kartu BSM ke Guru BK. Guru BK merekapitulasi dan memverifikasi data siswa pemilik Kartu BSM untuk dikirim ke Kemdikbud melalui Disdik Kota Yogyakarta. SK penerima BSM dikeluarkan oleh Kemdikbud kemudian ditindaklanjuti oleh sekolah untuk mengambil dana BSM di kantor pos. Dana BSM diambil secara kolektif oleh Guru BK dengan membawa surat kuasa yang ditanda tangani oleh siswa. Dana BSM diserahkan oleh Guru BK kepada siswa dan disaksikan oleh orang tua siswa. Dana BSM dimanfaatkan oleh siswa untuk membeli sepatu, seragam, alat tulis, tas, dan pianika. Tugas yang dilaksanakan oleh sekolah yaitu mendata siswa penerima Kartu BSM, mengirim laporan realisasi dana ke kantor pos dan Disdik Kota Yogyakarta, menerima pengaduan, dan memantau presensi siswa di sekolah. Faktor penghambat: pelaksana kebijakan di sekolah kurang beradaptasi dengan mekanisme baru, kurangnya pembinaan bagi siswa penerima bantuan, sulitnya mengumpulkan kuitansi pemanfaatan dana BSM dari siswa, terbatasnya dokumen atau arsip sekolah terkait BSM.

²⁸Sri Esnawati, *Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Thaun Pelajaran 2012/2013 di SMP Negeri 15 Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Skripsi) (Yogyakarta: UNY, 2014)

Ketiga, skripsi Rini Widiastuti.²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas Program CSR Pertamina dalam mengurangi Apus, meningkatkan APK, meningkatkan APM, dan meningkatkan Anjut siswa di SDN 1, 2 dan 3 desa Ledok. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluasi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif (penelitian tidak mengadakan perlakuan terhadap subjek penelitian hanya menganalisis data-data yang telah ada) dengan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif persentase. Data hasil analisis berupa persentase kemudian ditransformasikan dalam bentuk kalimat yang bersifat kuantitatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Program CSR Pertamina efektif dalam mengurangi Apus, meningkatkan APM, dan meningkatkan Anjut. Maka Program CSR Pertamina telah berhasil membantu penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di SDN 1, 2 dan 3 desa Ledok. Kegiatan CSR Pertamina diharapkan melakukan inovasi dalam Programnya dengan terus menyesuaikan keadaan dan kebutuhan daerah binaan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ghafuur Kharisma Ramadhan.³⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi memang sangat mempengaruhi efektifitas Implementasi Program BSM tetapi faktor eksternal seperti kurangnya partisipasi orang tua siswa sangat mempengaruhi bagi

²⁹Rini Widiastuti, *Evaluasi Terhadap Program CSR Pertamina dalam Rangka Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di SDNegeri 1, 2 dan 3 Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten Blora*, (Skripsi) (Semarang: UNNES, 2011)

³⁰Ghafuur Kharisma Ramadhan, *Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar di Kecamatan Sambas*, (Skripsi) (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2014)

terlaksananya program BSM SD dengan efektif. Sehingga dibutuhkan peningkatan partisipasi dari orang tua siswa miskin tersebut. Implementor dituntut menemukan strategi untuk meningkatkan partisipasi orang tua siswa, seperti meningkatkan koordinasi dengan kepala Desa sebagai pihak yang mengeluarkan kartu KPS sebagai syarat utama penerima BSM.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sekhul Islam.³¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Bantuan Siswa Miskin (BSM) dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Subjek penelitian ini adalah 60 siswa penerima bantuan siswa miskin di MTs Al-Muawanah Harjawinangun, metode pengumpulan data dengan angket dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa sesudah mendapatkan bantuan siswa miskin lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi belajar sebelumnya yang berarti bantuan siswa miskin efektif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persamaan terhadap penelitian ini diantaranya sama sama membahas mengenai program bantuan pendidikan gratis untuk siswa yang terekomendasi. Adapun perbedaannya bahwa penelitian ini lebih fokus pada Pemanfaatan Program KIP bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya akan mempengaruhi pada hasil penelitian yang diperolehnya.

³¹Muhammad Sekhul Islam, *Efektivitas Bantuan Siswa Miskin (BSM) dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa MTs Al Muawanah Harjawinangun Balapulang Tegal Tahun Pelajaran 2010/ 2011*, (Skripsi) (Tegal: Universitas Pancasakti, 2011).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan, maka skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

Pertama memuat bagian awal atau hal formalitas yang meliputi: Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi.

Kedua memuat bagian inti terdiri dari lima Bab antara lain: Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisikan Landasan Teori yaitu terkait dengan Efektifitas Program KIP Bagi Siswa Pada Jenjang Pendidikan SMK. Sub bab pertama adalah kebijakan pendidikan, sub bab kedua konsep efektifitas program, Sub bab ketiga adalah kemiskinan, sub bab keempat Program KIP bagi jenjang pendidikan SMK, sub bab kelima adalah tentang Permendikbud No. 12 Tahun 2015.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, yang berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan teknik analisis data penelitian.

Bab keempat merupakan pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini merupakan hasil dari penelitian yang berisi pengujian instrumen penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Adapun bab kelima merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian akhir memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB II

KEBIJAKAN BANTUAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR

A. Konsep Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan keinginan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan. Kebijakan tersebut terdiri dari kebijakan internal dan kebijakan eksternal. Kebijakan internal merupakan kebijakan yang hanya mempunyai kekuatan sendiri, sedangkan kebijakan eksternal merupakan kebijakan yang mengikat masyarakat dan biasanya disebut dengan kebijakan publik.³²

Kebijakan adalah terjemahan dari kata “*wisdom*” yaitu suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang atau kelompok orang tersebut tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain, ia dapat perkecualian. Artinya wisdom atau kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengemukakan bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep

³²Agustinus Hermino, *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 249.

dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.³³

Jadi yang dimaksud dengan kebijakan adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai sesuai dengan kebijakan atau aturan yang telah dibuat.

2. Tujuan dan Manfaat Kebijakan Pendidikan

Tujuan dari adanya kebijakan pendidikan tersebut adalah sudah pasti untuk mengatur mekanisme pendidikan yang ada untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks Negara Indonesia, maka tujuan dengan adanya kebijakan pendidikan adalah untuk mengawal dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sesuai dengan pengertian bahwa pendidikan sebagai usaha sadar, maka kebijakan-kebijakan pendidikan semestinya dibebaskan dari berbagai tekanan kekuasaan, kontrol politik, dan kontrol hukum yang tidak menunjang pengembangan program pendidikan. Dengan demikian

³³Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 96.

diharapkan kebijakan yang ada dapat memperlancar terselenggaranya kegiatan pendidikan secara dinamis, sejalan dengan tuntutan kebutuhan ilmu pengetahuan, tuntutan kebutuhan belajar peserta didik, tuntutan perubahan lingkungan, dan tuntutan masa depan.

Kebijakan pendidikan yang berorientasi pada empat tuntutan kebutuhan tersebut, di samping dapat melahirkan peradaban dan tatanan kehidupan yang lebih tertib, juga secara efektif dapat memfungsikan teori-teori pendidikan. Dengan berfungsinya teori-teori tersebut, siswa diharapkan dapat mengadopsi gejala perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk perubahan sikap, pola pikir, dan perilaku masyarakat yang cenderung mengarah ke suasana kehidupan yang lebih bebas, terbuka dan demokratis.³⁴

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan kualitas *output* yang handal dan kompetitif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang handal dan memiliki kemampuan bersaing di masa datang, dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai kebijakan telah dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional. Di samping itu kebijakan ini dibuat dalam rangka tugas dan fungsi Departemen Pendidikan Nasional.³⁵ Kebijakan dibuat dengan tujuan:

³⁴Agustinus Hermino, *Kepemimpinan Pendidikan...*, hlm.253-255.

³⁵M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.

- a. Memantapkan sistem dan standar pengelolaan pada semua jenjang pendidikan dengan mengupayakan demokratisasi dan desentralisasi pendidikan.
- b. Meningkatkan sosialisasi, diseminasi, advokasi, perintisan dan perluasan program layanan pendidikan serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat pada semua jenjang.
- c. Meningkatkan efisiensi pembiayaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat.
- d. Meningkatkan daya tampung, serta mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
- e. Menyempurnakan kurikulum nasional, dengan konsep pembelajaran moral, keimanan dan ketakwaan, budi pekerti, sastra dan pendidikan lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi setempat dan system penilaian hasil belajar siswa, serta menyempurnakan standar kompetensi tenaga kependidikan.
- f. Meningkatkan mutu, profesionalisme serta memperbaiki citra, harkat, martabat, serta upaya memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis jenjang pendidikan.
- g. Meningkatkan jumlah peserta didik dan mengembangkan program pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) yang berorientasi

pada peningkatan ketrampilan dan kemampuan kewirausahaan (*life skills*).

- h. Meningkatkan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga dengan lembaga pemerintah dan swasta di tingkat nasional dan internasional.
- i. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pendidikan pemuda dan olahraga.
- j. Meningkatkan dan memberdayakan peran dan fungsi hubungan masyarakat (*public relation*).
- k. Memanfaatkan system pengawasan pendidikan pemuda dan olahraga dengan mewujudkan keterpaduan antara pengawasan Inspektorat jenderal dan aparat pengawasan di daerah.³⁶

Studi kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik memiliki tiga manfaat yaitu:

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan

Dalam kaitan ini, ilmuan dapat menempatkan kebijakan pendidikan sebagai variabel terpengaruh, sehingga berusaha menentukan variabel pengaruhnya (*independen variable*). Studi ini berusaha mencari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan pendidikan. Sehingga nantinya akan diketahui dampak dari suatu kebijakan pendidikan tersebut.

³⁶M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan...*, hlm. 145.

- b. Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah pendidikan

Dengan mempelajari kebijakan pendidikan, para praktisi akan memiliki dasar teoritis tentang bagaimana membantu kebijakan pendidikan yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan pendidikan.

- c. Berguna untuk tujuan politik

Suatu kebijakan pendidikan yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik. Kebijakan tersebut dapat meyakinkan lawan-lawan politik yang kurang setuju.³⁷

3. Komponen Kebijakan Pendidikan

Kebijakan Pendidikan difahami untuk mencapai tujuan pembangunan Negara dan bangsa di bidang pendidikan. Pendidikan sebenarnya bisa dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi pemerintah menganggap bahwa pendidikan merupakan kegiatan strategis bagi perkembangan sebuah Negara karena penentu kualitas sebuah bangsa terletak pada pendidikan yang dicapai penduduknya.³⁸

Kebijakan pendidikan berproses melalui tahapan-tahapan. Selain melewati proses, kebijakan pendidikan juga mempunyai produk-produk kebijakan. Diantara komponen kebijakan pendidikan adalah:

- a. Perumusan kebijakan

³⁷M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan...*, hlm.46-47.

³⁸Muhammad Munadi & Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), hlm.18.

Setiap perumusan kebijakan pendidikan akan berdampak secara sosial maupun ekonomi terhadap masyarakat luas, baik positif maupun negatif. Untuk menghasilkan rumusan kebijakan pendidikan yang baik, ada beberapa kriteria yang diperhatikan yaitu:

- 1) Rumusan kebijakan tidak mendiktekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu.
- 2) Rumusan kebijakan dapat dipergunakan menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang.

Prosedur yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Data-data, informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang didapatkan merupakan masukan-masukan dari banyak peserta kebijakan pendidikan,
- b) Memilih masalah yang krusial saja yang mungkin dapat diselesaikan.
- c) Mendefinisikan, merumuskan, serta mengevaluasi dari berbagai alternatif agar menemukan pemecahan masalah yang tepat.
- d) Pengesahan dari perumusan kebijakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kebijakan.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan alternatif terbaik sebagai solusi pemecahan masalah. Tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah pada

implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program.³⁹

Untuk mengendalikan implementasi kebijakan ada beberapa langkah dari implementasi kebijakan pendidikan yaitu:

- 1) Implementasi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, utamanya kegiatan-kegiatan yang penting.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengadopsian.
- 3) Melakukan proses tinjauan manajemen terhadap hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.
- 4) Mencari cara-cara pengembangan berkelanjutan yang sesuai dengan sekolah.

Dalam implementasi kebijakan pendidikan, baik pemerintah, masyarakat serta sekolah idealnya secara bersama-sama dan saling bahu-membahu dalam bekerja dan melaksanakan tugas-tugasnya demi suksesnya implementasi kebijakan, siapa yang berperan dan bagaimana

³⁹ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktek Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 87

kebijakan tersebut harus dilaksanakan, serta dana pendukung yang proposional.

c. Pengawasan (*Monitoring*) Kebijakan

Monitoring atau pengawasan kebijakan bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efektif dan efisien. Pada dasarnya monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan, namun tidak mengganggu proses implementasi. Monitoring selalu berkaitan dengan evaluasi. Monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas pengawasan yang pada keduanya dimiliki tujuan yang sama yaitu untuk memastikan keberhasilan program.⁴⁰

Adapun metode memonitor dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Metode survei ke lapangan
- 2) Metode pemanfaatan ahli melalui Delphi atau hasil diskusi kelompok terfokus
- 3) Metode pengawasan di balik meja (*desk monitoring*) dengan memanfaatkan metode triangulasi, baik triangulasi data maupun triangulasi teori.⁴¹

Hasil dari monitoring kebijakan berupa informasi dalam pengambilan keputusan kebijakan yang tepat, sehingga informasi atau datanya harus dapat dipertanggung jawabkan (*valid dan reliable*).

⁴⁰ M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan...*, hlm. 111.

⁴¹ M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan...*, hlm. 114.

Informasi dan simpulan hasil monitoring diharapkan dapat membantu program kebijakan berhasil seperti yang diharapkan.

d. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan pendidikan secara umum dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan pendidikan dapat mencapai tujuan-tujuannya
- 2) Memberi panduan kepada para pelaksana kebijakan pendidikan mengenai seberapa lancar perjalanan atau proses kebijakan pendidikan tersebut diimplementasikan.
- 3) Menyediakan indikator penting bagi pembuatan kebijakan pendidikan di masa mendatang.

Evaluasi kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan yang ditetapkan. Evaluasi kebijakan pendidikan menyediakan data dan informasi yang bisa dipergunakan untuk menganalisis kebijakan pendidikan dan menunjukkan rekomendasi-rekomendasi bagi perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif sesuai kriteria yang ditetapkan. Indikator input (masukan), proses, output (keluaran), outcome (dampak) menjadi subjek bagi pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan administrator kebijakan dalam membuat sebuah

kebijakab, untuk mengetahui apakah kebijakan berjalan efektif juga efisien.⁴²

B. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).⁴³

Pengertian efektivitas yang diakui oleh Chung dan Maginson dalam bukunya E. Mulyasa menyebutkan “*Efektivenes means different to different people*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.⁴⁴

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun

⁴²M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan...*, hlm. 118.

⁴³Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 2014), hlm. 182

⁴⁴E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 82.

program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”⁴⁵

Pendapat Arens and Lortbecke mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”.⁴⁶ Sehubungan dengan yang Arens dan Lortbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Supriyono mendefinisikan pengertian efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”.⁴⁷

Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan keluaran tanggung jawab dengan sasaran yang harus di capai. Semakin besar keluaran yang dihasilkan dari sasaran yang akan dicapai maka dapat dikatakan efektif dan efisien. Suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang

⁴⁵Suwarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 1994), hlm. 16

⁴⁶Amir Abadi Yusuf, *Auditing Pendekatan Terpadu*, (Jakarta : Salemba Empat, 1994), hlm. 765

⁴⁷Supriyono R.A, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 2000), hlm. 29

dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.

Jadi efektivitas adalah sebuah pengukuran yang dilihat dari kesesuaian hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengukur efektivitas suatu program dalam hal ini program Kartu Indonesia Pintar dapat dilakukan dengan cara monitoring program yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program sudah sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, yakni sbb:

a. Sasaran program

Yakni mengukur sejauh mana program tersebut sudah tepat sasaran.

b. Ketepatan waktu

Yakni melihat ketepatan waktu penerimaan dana program sampai kepada masyarakat penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)

c. Pemanfaatan

Yakni melihat sejauh mana pemanfaatan dana yang diterima penerima Program Kartu Indonesia Pintar sudah dimanfaatkan dengan baik atau belum.

Hasil dari monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan program-program sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program tahun berikutnya.⁴⁸

⁴⁸Kementrian Agama, *Petunjuk Teknis Program...*, hlm. 24

2. Efektivitas Program

Efektif adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya, semakin efektif organisasi tersebut.⁴⁹

Untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:⁵⁰

a. Ketepatan Sasaran Program

Yaitu sejauhmana pelanggan dari program tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Sosialisasi Program

Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya.

c. Tujuan Program

Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Pemantauan Program.

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan.

⁴⁹Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 21.

⁵⁰Ni Wayan Budiani, 2007. "Efektivitas program penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", *INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial* Volume 2 Nomor 1, Bali: Universitas Udayana, hlm. 53.

Menurut Emil Salim, efektivitas juga memiliki pengertian sebagai suatu ketepatan dari suatu program tindakan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu pekerjaan itu sendiri.⁵¹ Kemudian menurut Yutchman dan Seashore dalam bukunya Alo Liliweri yang berjudul sosiologi organisasi bahwa;

“Efektivitas organisasi sangat tergantung antara lain oleh bagaimana organisasi secara relatif mengeksploitasi lingkungan dari sumber daya yang langka dan sumber-sumber lain yang bernilai untuk mencapai tujuan organisasi”.⁵²

Dari beberapa penjelasan diatas bahwa efektivitas merupakan tolak ukur dalam pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh sebuah organisasi. Hal ini sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Handyaningrat yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁵³

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa efektivitas selalu berorientasi pada pencapaian tujuan suatu program atau kebijakan dari organisasi. Organisasi dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yang tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai sendiri-sendiri. Jadi dengan organisasi sebagai alat itulah, orang atau orang-orang ingin mencapai tujuan. Dengan demikian, efektivitas merupakan keberhasilan organisasi dalam menjalankan program atau kebijakannya melalui berbagai sarana dan cara serta upaya memanfaatkan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta dalam

⁵¹Emil Salim, *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm.94.

⁵²Alo Liliweri, *Sosiologi Organisasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.121.

⁵³Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi...*, hlm. 6.

mencapai ukuran efektivitas program atau kebijakan sebuah organisasi dapat menggunakan kriteria-kriteria diatas.

C. Kemiskinan

Kemiskinan menurut Sukanto diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok. Pada masyarakat modern, kemiskinan menjadi satu permasalahan sosial karena sikap yang membenci kemiskinan. Seseorang bukan merasa miskin karena kekurangan makanan, pakaian ataupun perumahan, tetapi karena karena harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada.⁵⁴

Adapun pendapat lain menjelaskan kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan”, secara konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada di atas ambang minimal kategori sejahtera. Akhirnya kemiskinan dipandang dengan melihat masalah keuangan.⁵⁵

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari segi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per

⁵⁴Sukanto S, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 402

⁵⁵Jonathan Houghton, Khander, *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm.1

bulan dibawah garis Kemiskinan.⁵⁶ Garis Kemiskinan yang telah ditetapkan BPS dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Jika mengacu pada parameter BPS yang menghitung kemiskinan berdasarkan konsumsi maka garis kemiskinan per september 2014 adalah Rp 312.328,00 per kapita perbulan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Ukuran kemiskinan diukur dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) yang dilakukan terpisah antara perkotaan dan pedesaan. GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 2.100 kkal per kapita dalam sehari sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk kebutuhan dasar seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya.⁵⁷

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dengan pendapatannya tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Ukuran kemiskinan diukur berdasarkan garis kemiskinan yaitu kebutuhan per kapita per hari.

Penyebab kemiskinan menjadi 4 Faktor penentu utama kemiskinan adalah sebagai berikut;⁵⁸

1. Karakteristik wilayah

Baiknya pemerintahan, sebuah kebijakan lingkungan yang bijaksana, stabilitas ekonomi, politik dan pasar, partisipasi massa,

⁵⁶<https://www.bps.go.id> (Diakses pada 26 Mei 2017, Pukul 09.48 WIB) (Badan Pusat Statistik Indonesia 2014, hlm. 120-121)

⁵⁷<https://www.bps.go.id> (Diakses pada 26 Mei 2017, Pukul 09.48 WIB) (Badan Pusat Statistik, hlm. 109)

⁵⁸Jonathan Houghton, Khander, *Pedoman Tentang Kemiskinan...*, hlm. 165

keamanan global dan wilayah, serta peradilan yang adil, fungsional, dan efektif mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu wilayah.

2. Karakteristik Masyarakat

Kemiskinan dipengaruhi oleh rata-rata perkembangan sumber daya manusia, akses pada pekerjaan, pergerakan dan keterwakilan sosial dan distribusi tanah.

3. Karakteristik Rumah Tangga

Kemiskinan dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, pengangguran dalam keluarga (pengangguran muda dan tua), aset yang dimiliki keluarga (tanah, perumahan dan perhiasan), dan rata-rata kesehatan dan pendidikan para anggota keluarga.

4. Karakteristik Individu

Usia, Pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan etnis sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah utama yang dialami bangsa Indonesia. Pemerintah membuat kebijakan dengan menerbitkan Kartu Perlindungan Sosial. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menjelaskan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yaitu kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda rumah tangga miskin. KPS memuat informasi nama kepala keluarga, nama pasangan rumah tangga, nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, no kartu keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomer identitas KPS yang unik. KPS ini berguna untuk mendapatkan manfaat dari Program Subsidi beras miskin (RASKIN),

Manfaat Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).⁵⁹ Program ini bertujuan untuk membantu agar rumah tangga miskin dan rentan dapat menerima manfaat dari semua Program Perlindungan Sosial yang berhak diterimanya, sehingga membantu upaya rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan.

D. Program Indonesia Pintar

1. Pengertian Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang mengamatkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai penyempurnaan dari program sebelumnya yaitu Bantuan Siswa Miskin. Program Indonesia Pintar bertujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah dan mencegah atau menarik peserta didik putus sekolah.⁶⁰

⁵⁹ www.tnp2k.go.id Diakses pada 05 Oktober 2017, Pukul 09.36 WIB

⁶⁰ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*..., hlm. 2

2. Sasaran Program Indonesia Pintar

Penerima Program Indonesia Pintar diprioritaskan kepada anak yang berusia 6 sampai 21 tahun. Persyaratan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada pendidikan formal adalah peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik Sekolah dan diusulkan oleh sekolah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis Kemendikbud.⁶¹

Sasaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2015 adalah sebanyak 17.920.270 peserta didik dengan jumlah siswa SMK/Kursus dan Pelatihan sebanyak 1.846.538 peserta didik. Besaran dana PIP per peserta didik untuk SMK adalah sebesar Rp 1.000.000,- per tahun bagi siswa kelas X dan XI SMK dengan program 3 tahun. Sementara bagi siswa kelas XII mendapatkan dana PIP untuk satu semester sebesar Rp 500.000,-.⁶²

3. Pemanfaatan dana PIP dan Larangan Dana PIP

Program BSM/PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa untuk pemanfaatan sebagai berikut:

- a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah
- b. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll)
- c. Transportasi siswa ke sekolah

⁶¹Kemendikbud, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*..., hlm. 4

⁶²Kemendikbud, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*..., hlm. 4-5

- d. Uang saku siswa ke sekolah
- e. Biaya kursus/les tambahan.⁶³

Penerima BSM/PIP tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan, antara lain: judi, narkoba, miras dan tindakan negatif lainnya.

Setelah menerima dana Program Indonesia Pintar peserta didik mempunyai kewajiban menggunakan dana Program Kartu Indonesia Pintar sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana, terus bersekolah dengan rajin dan tekun, disiplin melaksanakan tugas-tugas sekolah, dan berkepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan tercela.

4. Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar melibatkan instansi-instansi terkait antara lain mencakup sekolah, dinas kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, direktorat teknis, lembaga penyalur sebagaimana alur diagram berikut.

a. Mekanisme Pengusulan

Pengusulan calon penerima PIP menurut Petunjuk Teknis Kemendikbud yaitu siswa dari keluarga pemilik KPS/KKS/KIP untuk sekolah formal mengentri (updating) data siswa calon penerima PIP 2015 ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap. Data berfungsi sebagai data usulan siswa calon penerima dari sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/ kota dan direktorat teknis. Dinas

⁶³Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*...,hlm. 13

pendidikan kabupaten/kota meneruskan usulan calon penerima dari sekolah yang disetujui sebagai usulan ke direktorat teknis.⁶⁴

Bagi siswa yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP dari keluarga miskin/rentan miskin dapat diusulkan oleh sekolah setelah seluruh siswa/anak dari keluarga pemilik KPS/KKS/KIP ditetapkan sebagai penerima BSM/PIP 2015. Sekolah menyeleksi dan menyusun daftar siswa yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP sebagai calon penerima dana BSM/PIP 2015 dengan prioritas sebagai berikut: a) Siswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) b) Siswa dengan status yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan; c) Siswa yang terkena dampak bencana alam; d) Anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah (drop-out) yang diharapkan kembali bersekolah; e) Siswa dari keluarga miskin/ rentan miskin yang terancam putus sekolah; f) siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti: kelainan fisik, korban musibah, siswa dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara tinggal serumah; g) Siswa dari SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian (bidang Agrobisnis dan Agroteknologi) Perikanan, Peternakan, kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

Setelah sekolah menyeleksi sesuai prioritas kemudian mengusulkan sebagai penerima PIP 2015 melalui aplikasi Verifikasi

⁶⁴Kemendikbud dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*..., hlm. 6-10

Indonesia Pintar (VIP) yang tersedia di laman dinas pendidikan kabupaten/kota. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyetujui dan selanjutnya meneruskan ke direktorat teknis usulan calon penerima BSM/PIP 2015.

Siswa juga dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan ke direktorat teknis sesuai dengan prioritas sasaran dan persyaratan yang ditetapkan, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi data usulan terhadap data pokok pendidikan (Dapodik).

b. Mekanisme Penetapan Penerima

Penetapan penerima Program Indonesia Pintar ditetapkan melalui beberapa tahap diantaranya: a) Direktorat teknis menerima usulan calon siswa penerima PIP dari dinas pendidikan kabupaten/kota; b) Direktorat teknis menetapkan siswa penerima PIP dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis sedangkan untuk usulan SMK yang berada dibawah binaan provinsi, pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.⁶⁵

c. Mekanisme Penyaluran

Penyaluran dana BSM/PIP 2015 dilakukan oleh lembaga penyalur berdasarkan daftar penerima BSM/PIP dari Direktorat teknis yang tercantum dalam SK melalui Tabunganku dan virtual account. Direktorat Teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat

⁶⁵Kemendikbud, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)...*, 10-11

Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SK direktur. Setelah itu KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur untuk menyalurkan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening siswa penerima. Direktorat teknis menginformasikan daftar siswa penerima kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan SK penerima. Penerima PIP dapat mencairkan dana BSM/PIP di lembaga penyalur.⁶⁶

d. Mekanisme Pengambilan Dana

Pencairan dana PIP dilakukan oleh penerima membawa dokumen Surat Keterangan Kepala Sekolah, Foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap, dan KTP peserta didik. Bagi penerima yang belum memiliki KTP pengambilan dana harus didampingi orang tua dengan menunjukan KTP orang tua. Penerima menandatangani bukti penerimaan dana yang telah disediakan oleh lembaga penyalur. Bagi penerima yang menggunakan virtual account dan berada di daerah terpencil dapat melakukan pengambilan secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah atau bendahara.⁶⁷

5. Peran dan Fungsi Lembaga Pemerintah

a. Direktorat Teknis

⁶⁶Kemendrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*..., hlm.11.

⁶⁷Kemendrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*..., hlm. 11-12

Pengelola BSM/PIP 2015 adalah Direktorat teknis yang terdiri dari (a) Direktorat Pembinaan SD; (b) Direktorat Pembinaan SMP; (c) Direktorat Pembinaan SMA; (d) Direktorat Pembinaan SMK; (e) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; dan (f) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Direktorat teknis memiliki peran dan fungsi untuk menetapkan mekanisme pelaksanaan program PIP yang dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis, melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP, mendorong sekolah satuan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengentri data siswa calon penerima PIP baik yang memiliki KPS/KKS/KIP maupun usulan sekolah ke dalam aplikasi Dapodik, melakukan identifikasi, kompilasi, dan sinkronisasi data siswa calon penerima PIP, menetapkan daftar penerima BSM/PIP 2015 dalam bentuk surat keputusan (SK), menetapkan lembaga penyalur, menginformasikan daftar penerima kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan SK penerima, menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan PIP, melakukan pemantauan implementasi PIP dan menyusun laporan pelaksanaan PIP.⁶⁸

b. Dinas Pendidikan Provinsi

Peran dan fungsi dinas pendidikan provinsi adalah mensosialisasikan program PIP 2015 kepada seluruh Kabupaten/ Kota

⁶⁸Kemendiknas dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*..., hlm. 14.

dan masyarakat di wilayahnya, mendorong kepala sekolah untuk melaporkan siswanya sesuai prioritas sasaran, mengikuti kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembinaan tingkat pusat, memantau implementasi PIP sesuai juknis.⁶⁹

c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan PIP yaitu mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP kepada seluruh sekolah dan masyarakat, memantau sekolah untuk memutakhirkan data siswa calon ke dalam aplikasi Dapodik, mengesahkan usulan dari sekolah dan selanjutnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA, dan SMK, menyampaikan surat keputusan (SK) direktur teknis perihal penerima BSM/PIP ke sekolah, memantau pelaksanaan penyaluran dana BSM/PIP kepada siswa/anak penerima, menangani pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan BSM/PIP.⁷⁰

d. Sekolah/Lembaga Pendidikan

Peran dan fungsi sekolah dalam pelaksanaan PIP adalah menyeleksi dan mengusulkan siswa calon penerima dana BSM/PIP sesuai prioritas sasaran, menginformasi kepada siswa penerima bahwa dana BSM/PIP 2015 telah siap diambil, membuat surat keterangan kepala sekolah sebagai persyaratan pengambilan dana oleh

⁶⁹Kemendikbud dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*..., hlm. 14.

⁷⁰Kemendikbud dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*..., hlm. 15.

siswa di lembaga penyalur, memberikan pengarahan kepada siswa penerima dana BSM/PIP 2015 dalam pemanfaatan dana, memantau proses pencairan dana BSM/PIP di lembaga penyalur dan sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tidak bersekolah dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP sebagai calon peserta/warga belajar untuk diusulkan sebagai calon penerima dana BSM/PIP.⁷¹

6. Pemanfaatan Bantuan Siswa Miskin atau Program Indonesia Pintar

Pengertian pemanfaatan menurut kamus besar bahasa indonesia menyebutkan bahwa pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe-an yang mengandung arti yaitu proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian pemanfaatan berdasarkan pengertian masing-masing adalah guna, proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu dalam hal ini pemanfaatan terhadap efektivitas penggunaan alokasi dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap kegiatan pembiayaan dalam proses pembelajaran selama menempuh pendidikan.⁷²

Pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan petunjuk teknis Program Indonesia Pintar tahun 2015 antara lain: 1) Pembelian buku dan alat tulis sekolah; 2) Pembelian pakaian dan

⁷¹Kemendikbud dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)...*, hlm. 15.

⁷²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 711

perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); 3) Transportasi siswa ke sekolah; 4) Uang saku siswa ke sekolah; 5) Biaya kursus/les yang tidak diselenggarakan oleh sekolah.⁷³

Dana Program Indonesia Pintar diterima langsung oleh siswa atau orang tua dan penerima berkewajiban menggunakan dana PIP 2015 sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana dari pemerintah.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah hipotesis yang dibuat atau digunakan dalam suatu penelitian.⁷⁴ Berdasarkan kerangka berfikir diatas, peneliti membuat hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian sebelumnya telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang akan digunakan dan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah hipotesis nol (H_0). Peneliti membuat hipotesis mengenai efektivitas program kartu indonesia pintar bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

H_a : Efektifitas Program Kartu Indonesia Pintar bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap lebih dari 70%

H_0 : Efektifitas Program Kartu Indonesia Pintar bagi Siswa SMK di

⁷³Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*..., hlm. 11

⁷⁴Husaini Usman, *Manajemen: Teori,Praktek dan Research Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 34

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap kurang dari atau sama
dengan
70%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian cara atau rancangan penelitian dalam pengumpulan data. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, sumber data dengan cara bagaimana data tersebut diolah. Tujuan dari metode penelitian adalah penggunaan metode yang tepat agar dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Irawan mengatakan, metode penelitian merupakan totalitas cara yang dipakai peneliti untuk menemukan kebenaran ilmiah.⁷⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif dan penjelasan deskriptif.

Metode survei adalah metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual dari suatu kelompok atau daerah. Metode survei membedah masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap praktik-praktik yang sedang berlangsung. Pada metode survei terdapat perbandingan-perbandingan terhadap hal-hal yang telah dikerjakan orang dalam menangani situasi atau masalah serupa yang hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana dan pembuatan keputusan dimasa yang akan

⁷⁵Irawan Prasetya, *Metodologi Penelitian Administrasi; Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006), hlm. 101.

datang.⁷⁶ Sehingga penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan faktual mengenai Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar) yang merupakan salah satu kebijakan pendidikan gratis dari pemerintah.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di SMK yang berada di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap yang berjumlah 2 sekolah menengah kejuruan yaitu SMK Yos Sudarso dan SMK Komputama. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober s/d 22 Desember 2017.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik kesimpulannya. Populasi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/objek itu.⁷⁷

Dari penjelasan diatas, maka peneliti menetapkan populasi dalam penelitian ini yaitu siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar. Di kecamatan Jeruklegi terdapat dua SMK dan jumlah siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar sebesar 487 siswa.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau sampel dapat didefinisikan sebagai

⁷⁶Moh. Nazir, *metode penelitian*, (Bogor : ghalia indonesia, 2005), hlm. 52.

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 117.

anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.⁷⁸ Untuk pengambilan sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *proportional random sampling* guna menentukan responden penelitian secara representatif.

Adapun untuk menentukan sampel di masing-masing sekolah siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar dipilih dengan cara *simple random sampling* sebagai responden, dimana setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai responden penelitian. Dalam pengambilan dan penentuan jumlah sampel, sebenarnya tidak ada ketentuan yang mutlak dalam penentuan responden, tetapi sekedar gambaran dapat mengikuti petunjuk:

1. Jika jumlah anggota populasi berada antara 101 sampai dengan 500, maka sampel dapat diambil 30-40%.
2. Jika jumlah populasi sampai dengan 50, sebaiknya dijadikan sampel semua atau sering disebut dengan sampel total, artinya seluruh anggota populasi dijadikan objek penelitian.⁷⁹

Dengan jumlah populasi 480 siswa, diambil sampel sebanyak 30%, diperoleh sampel sejumlah:

$$\text{Total Sampel} = \frac{30}{100} \times (\text{Jumlah Populasi})$$

$$\text{Total Sampel} = \frac{30}{100} \times 480 = 144$$

⁷⁸Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), hlm. 76-77.

⁷⁹Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 224.

Maka, perhitungan sampel dari tiap tiap sekolah yang ada di Kecamatan Jeruklegi berdasarkan perhitungan adalah sebagai berikut:

Rumus 1
Perhitungan Sampel

$$Sampel_1 = \frac{populasi_1}{totalpopulasi} \times TotalSampel$$

Tabel 1
Hasil Perhitungan Sampel

No	Nama Sekolah	Jml Populasi	Perhitungan	Hasil Akhir
1	SMK Komputama	337	$\frac{337}{487} \times 146$	101
2	SMK Yos Sudarso	150	$\frac{150}{487} \times 146$	45
	Total	487		146

Sumber: Diolah Peneliti, 2017

D. Variabel Penelitian

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan proses pemberian definisi konseptis atau definisi konseptual pada sebuah konsep. Definisi konseptual merupakan sebuah definisi dalam bentuk yang abstrak yang mengacu pada ide-ide lain atau konsep-konsep lain yang abstrak untuk menjelaskan konsep pertama tersebut.⁸⁰

⁸⁰Bambang Prasetya & Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 90

Efektivitas merupakan tolak ukur dalam pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh sebuah organisasi. Hal ini sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Handyaningrat yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁸¹ Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu berorientasi pada pencapaian tujuan suatu program atau kebijakan dari organisasi. Efektifitas dalam penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar tingkat efektifitas program yang dibuat oleh pemerintah dalam mewujudkan program wajar 12 tahun melalui pendidikan gratis.

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin.⁸² Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang mengamanatkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai penyempurnaan dari program sebelumnya yaitu Bantuan Siswa Miskin. Program Indonesia Pintar bertujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah dan mencegah atau menarik peserta didik putus sekolah.⁸³

⁸¹Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta:Gunung Agung, 1986), hlm.6.

⁸²Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar

⁸³Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*, (Jakarta: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2015), hlm. 2.

Dalam hal ini peneliti akan lebih memfokuskan pada seberapa besar tingkat efektifitas Program Indonesia Pintar melalui Program Kartu Indonesia Pintar bagi siswa pada jenjang pendidikan SMK di Kecamatan Jeruklegi.

2. Definisi Operasional

Suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti atau menspesifikan kegiatan ataupun memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi operasional yang diukur memberikan gambaran bagaimana variabel tersebut diukur.⁸⁴ Adapun indikator dari variabel penelitian ini yang berupa efektifitas program adalah sebagai berikut;

- a. Ketepatan sasaran program
- b. Sosialisasi program
- c. Tujuan program
- d. Pemantauan program

Berdasarkan pada indikator di atas, maka dapat dikembangkan instrumen penelitian untuk setiap indikator dengan sub indikator penelitian dan nomor item pada kisi-kisi sebagai berikut:

Tabel 2
Kisi-kisi Instrumen Penelitian Efektivitas Program

Variabel	Aspek	Indikator	Sub Indikator	Butir Soal	
				Positif	Negatif
	Masukan	Ketepatan Sasaran Program	Pengajuan penerima KIP	10, 11	12

⁸⁴Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 126.

Efektivitas	Proses	Sosialisasi Program	Penetapan penerima KIP	13,14, 15	-
			Sosialisasi Program KIP kepada siswa/ortu	7,9	8
			Pengetahuan penerima KIP	1,2,3	-
			Pengetahuan pelaksanaan KIP	4,6	5
	Keluaran	Tujuan Program	Pencairan dana KIP	16,17, 18	-
			Alokasi Penggunaan dana oleh siswa/ ortu	21,22, 24,25, 26,27, 29,30	23, 28
		Pemantauan Program	Monitoring dan evaluasi program	19, 20	-

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.⁸⁵ Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti dan diukur dari indikator-indikator variabel yang diberikan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti untuk variabel efektivitas adalah skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala ini, variabel yang akan diukur dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang kemudian dijadikan titik tolak untuk

⁸⁵Irawan prasetya, *metodologi penelitian administrasi...*, hlm. 101.

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Instrumen yang digunakan dalam bentuk checklist.⁸⁶ Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, dapat dilihat sebagai berikut;

Table 3
Skoring item instrumen positif

Pilihan jawaban	Skor
Sangat setuju/ selalu	4
Setuju/ sering	3
Tidak setuju/ kadang-kadang	2
Sangat tidak setuju/ tidak pernah	1

Table 4
Skoring item instrumen negatif

Pilihan jawaban	Skor
Sangat setuju/ selalu	1
Setuju/ sering	2
Tidak setuju/ kadang-kadang	3
Sangat tidak setuju/ tidak pernah	4

F. Teknik Pengumpulan Data

Proses mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode angket (kuesioner), studi dokumen, studi pustaka, dan observasi. Berdasar pada metode yang digunakan, maka alat pengumpulan

⁸⁶Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, *SPSS vs LISREL, (Sebuah Pengantar: Aplikasi untuk Riset)* (Jakarta:Salemba Empat, 2011), hlm. 6.

data yang diperlukan berupa lembar angket (kuesioner), dan pedoman dokumentasi.

1. Angket (kuesioner)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁸⁷ Dalam penelitian ini kuesioner berupa angket tertutup, dengan jawaban yang telah disediakan, sehingga responden hanya membubuhkan tanda *checklist* (√) sesuai dengan pilihan jawabannya. Kuesioner penelitian ini terdiri dari kuesioner program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan 30 item pernyataan yang ditunjukkan kepada siswa SMK penerima KIP di Kecamatan Jeruklegi.

2. Wawancara

Sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara terstruktur dengan menggunakan angket sebagai alat untuk melakukan wawancara.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan

⁸⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 142.

sebagainya.⁸⁸ Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yang bersifat dokumentasi guna menunjang masalah-masalah yang ada dalam penelitian.

4. Studi Pustaka

Pengumpulan data diperoleh dari berbagai referensi yang relevan mengenai penelitian ini berdasarkan teks book maupun jurnal ilmiah.

5. Observasi

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

G. Teknik Penentuan Kualitas Instrumen

1. Validitas

Pengujian validitas isi tersebut valid yaitu apabila instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Terdapat dua jenis validitas untuk instrumen penelitian, yaitu validitas internal/rasional/logis dan validitas eksternal/empiris. Instrumen yang mempunyai validitas internal/rasional/logis, bila kriteria yang ada dalam instrumen secara analisis akal sudah sesuai dengan validitas isi dan validitas konstruksi. Untuk memperoleh instrumen yang memiliki

⁸⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 201.

validitas rasional/logis, baik validitas isi maupun validitas konstruk, peneliti dapat mengatur dengan merencanakannya pada waktu instrumen akan disusun. Apabila pada waktu menyusun instrumen peneliti sudah melewati prosedur membuat kisi-kisi dan mendasarkan diri pada waktu menyusun butir-butirnya, serta melengkapi laporan penelitian dengan uraian mengenai apa yang telah dilakukan, pembaca laporan penelitian tersebut tidak akan mempermasalahkan masalah validitas instrumen tersebut.⁸⁹

Langkah-langkah dalam menyusun instrumen pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera dalam problematika penelitian.
- b. Menjabarkan variabel menjadi sub variabel atau bagian variabel.
- c. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
- d. Menderetkan deskriptor dari setiap indikator.
- e. Merumuskan setiap deskriptor menjadi butir-butir instrumen.
- f. Melengkapi instrumen dengan (pedoman atau instruksi) dan katapengantar.⁹⁰

Sementara menurut Sugiyono, untuk menguji validitas konstruksi, dapat digunakan pendapat dari ahli (*judgment experts*), yang akan memberikan keputusan instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan, ada

⁸⁹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 219-220.

⁹⁰Suharsimi Arikunto, *Manajemen...*, hlm. 178.

perbaikan dan dirombak total.⁹¹ Untuk memperoleh validitas konstruksi, peneliti melakukan konsultasi instrumen kepada Dr. Maria Ulpah, S.Si, M.Si dengan keputusan instrumen dapat digunakan dengan sedikit perbaikan.

Setelah memperoleh validitas konstruksi, peneliti juga menguji validitas butir dalam instrumen yang telah disusun untuk mengetahui instrumen itu valid atau tidak. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Validitas tersebut digunakan untuk mengetahui harga tiap butir instrumen terhadap skor total. Semakin besar harga skor butir terhadap skor total, maka validitas butir dari instrumen tersebut semakin tinggi. Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment yang kegunaannya untuk mengetahui derajat hubungan, sebagai berikut:

Rumus 2
Korelasi Product Moment

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n(\sum x^2) - (\sum x)^2\}\{n(\sum y^2) - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

r : Koefisien korelasi product moment

$\sum x$: jumlah skor dalam sebaran x

$\sum y$: jumlah skor dalam sebaran y

⁹¹Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 173.

$\sum xy$: jumlah hasil kali skor x dan y yang berpasangan

$\sum x^2$: jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran x

$\sum y^2$: jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y

n : jumlah sampel

2. Reliabilitas

Instrumen reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.⁹² Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach yaitu perhitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir-butir pernyataan dalam kuesioner. Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrumen yang benar-benar tepat dan akurat. Rumus Alpha Cronbach adalah:⁹³

Rumus 3 Alpha Cronbach

$$a = \left(\frac{k}{k-1}\right) \left(1 - \frac{\sum \sigma^2 b}{\sigma^2 t}\right)$$

Keterangan:

k : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma^2 b$: Jumlah varians butir

$\sigma^2 t$: varians total

3. Normalitas

⁹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 121.

⁹³Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 239

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan analisis data. Uji normalitas dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam satu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data distribusi normal.⁹⁴ Uji normalitas yang digunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Rumus *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebagai berikut:⁹⁵

Rumus 4
Kolmogorov-Smirnov

$$KD = 1,36 \frac{\sqrt{n_1 + n_2}}{n_1 n_2}$$

Keterangan :

KD = jumlah *Kolmogorov-Smirnov* yang dicari

n_1 = jumlah sampel yang diperoleh

n_2 = jumlah sampel yang diharapkan

Data dikatakan normal, apabila nilai signifikan lebih besar 0,05 pada ($P > 0,05$). Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 pada ($P < 0,05$), maka data dikatakan tidak normal.

⁹⁴Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 45.

⁹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 257.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan. Pengolahan data dilaksanakan dengan melalui tahap memeriksa (*editing*), pemberian identitas (*coding*), dan tahap pembeberan (*tabulasi*). Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap memeriksa (*editing*)

Kegiatan yang dilakukan setelah peneliti menghimpun data dilapangan. Kegiatan ini dilakukan dengan melihat kembali catatan, informasi, data, angket/kuesioner yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Apabila dalam kuesioner terdapat pertanyaan yang belum terjawab, ataupun terdapat kejanggalan ataupun ketidak konsistenan jawaban atas pertanyaan yang diberikan, maka data harus diperbaiki dengan kembali kelapangan dan menemui responden data bersangkutan.

2. Tahap pemberian identitas (*coding*)

Mengklasifikasi data-data dengan memberikan identitas sesuai dengan kategori masing-masing dari tiap-tiap jawaban responden.

3. Tahap pembeberan (*tabulasi*)

Tabulasi merupakan tahap terakhir dari pengolahan data. Tabulasi merupakan proses menginput, mengatur dan menghitung data yang telah didapat, dapat dideskripsikan/ dapat dibaca.

Setelah proses pengolahan data telah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan upaya peneliti

untuk menyajikan data dengan mengelompokan data sesuai dengan kategori sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data kuantitatif deskriptif dengan pengolahan data statistik deskriptif digunakan untuk dapat melakukan perhitungan secara sistematis, sebagai alat bantu analisis, dan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun analisis data yang digunakan adalah:

1. Metode deskriptif persentase

Untuk menggambarkan bagaimanakah tingkat efektivitas program Kartu Indonesia Pintar bagi siswa smk di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap digunakan rumus frekuensi relatif (angka persenan), yaitu:⁹⁶

Rumus 5
Frekuensi Relatif

$$p = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

f = frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = *Number of Cases* (jumlah frekuensi/ banyaknya individu)

P = angka persentase

Kualifikasi dideskripsikan atas dasar skor rerata ideal (M_i) dan simpangan baku ideal (SD_i). Dengan menggunakan 4 jenjang kualifikasi, kriterianya dapat disusun seperti berikut:⁹⁷

⁹⁶Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012), hlm. 43.

- Sangat Baik : $> (Mi+1,5SDi)$
- Baik : $(Mi+0,5 SDi) \text{ s/d } (Mi+1,5SDi)$
- Cukup : $(Mi-0,5 SDi) \text{ s/d } (Mi+0,5SDi)$
- Buruk : $<(Mi-1,5 SDi)$

Keterangan :

Mi = rata-rata ideal = $\frac{1}{2}$ (skor maksimum ideal + skor minimum ideal)

SDi = simpangan baku ideal = $\frac{1}{6}$ (skor maksimum ideal – skor minimum ideal).

2. T-test

Adapun untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan

Uji T (t-test) satu sampel dengan rumus berikut:⁹⁸

Rumus 6 t-test

$$t = \frac{\pi - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Keterangan:

t = nilai t yang dihitung, selanjutnya disebut t hitung

π = nilai rata-rata x

μ_0 = nilai yang dihipotesiskan

s = simpangan baku sampel

n = jumlah anggota sampel.

⁹⁷Muhammad Ali Gunawan, *Statistik Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi, dan Sosial*. (Yogyakarta: Parama Publishing, 2015), hlm. 40.

⁹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 250

Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis alternatif (H_a) lebih besar dari ($>$) dan Hipotesis Nol (H_0) kurang dari atau sama dengan (\leq) sehingga yang digunakan adalah uji dua pihak dengan taraf kesalahan 5%. Dengan demikian berlaku ketentuan:

1. Bila $-t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak
2. Bila $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini, disajikan hasil penelitian setelah semua data yang diperlukan terkumpul. Berdasarkan teori yang ada, penulis menganalisis data sesuai dengan pokok permasalahan dan hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan dana Program Kartu Indonesia Pintar bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program kebijakan Kartu Indonesia Pintar bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

A. Hasil Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.

Dalam penelitian ini, sebelum kuesioner disebarkan kepada responden yang berjumlah 146 siswa, kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya. Validitas yang digunakan adalah validitas logis dan empiris. Untuk mendapatkan validitas logis (validitas isi dan validitas konstruksi) peneliti mengikuti langkah-langkah dalam penyusunan instrumen pengumpulan data. Kemudian untuk memperkuat validitas

konstruksi peneliti juga menggunakan pendapat ahli, dengan mengkonsultasikan kepada Dr. Maria Ulpah, S.Si, M.Si pada tanggal 18 Desember 2017, dengan memberi keputusan instrumen dapat digunakan dengan sedikit perbaikan. Setelah diperbaiki dan dinyatakan valid oleh beliau maka selanjutnya digunakan uji validitas instrumen, dengan menguji cobakan kepada 50 responden siswa. Adapun langkah-langkah uji validitas adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan responden uji coba instrumen. Dalam penelitian ini berjumlah 50 responden. Responden tersebut bukan anggota sampel penelitian ini, tetapi diambil dari populasi di mana peneliti melakukan penelitian yaitu siswa SMK penerima bantuan Program Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.
- b. Membagikan instrumen kepada responden sampel untuk diisi sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada lembar depan instrumen.
- c. Menarik kembali semua instrumen yang telah dibagikan untuk kemudian diperiksa dan dianalisis menggunakan SPSS dengan *teknis Corrected Item Total Correlation*.
- d. Kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan valid jika memiliki nilai r hitung lebih besar atau sama dengan r tabel. $N=50$ sebesar 0,279 dan nilai signifikansi lebih kecil sama dengan taraf signifikansi 5%. Jika nilai r hitung lebih kecil dari r tabel, maka butir instrumen yang dimaksud tidak valid atau gugur. Hasil uji validitas berdasarkan

perhitungan dengan menggunakan SPSS *for Windows* 22.0 sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,941	0,279	Valid
Pernyataan 2	0,900	0,279	Valid
Pernyataan 3	0,489	0,279	Valid
Pernyataan 4	0,989	0,279	Valid
Pernyataan 5	0,087	0,279	Tidak Valid
Pernyataan 6	0,749	0,279	Valid
Pernyataan 7	0,586	0,279	Valid
Pernyataan 8	0,907	0,279	Valid
Pernyataan 9	0,929	0,279	Valid
Pernyataan 10	0,989	0,279	Valid
Pernyataan 11	0,868	0,279	Valid
Pernyataan 12	0,407	0,279	Valid
Pernyataan 13	0,915	0,279	Valid
Pernyataan 14	0,989	0,279	Valid
Pernyataan 15	0,523	0,279	Valid
Pernyataan 16	0,947	0,279	Valid
Pernyataan 17	0,927	0,279	Valid
Pernyataan 18	0,273	0,279	Tidak Valid
Pernyataan 19	0,583	0,279	Valid
Pernyataan 20	0,586	0,279	Valid
Pernyataan 21	0,308	0,279	Valid
Pernyataan 22	0,870	0,279	Valid
Pernyataan 23	0,796	0,279	Valid
Pernyataan 24	0,763	0,279	Valid
Pernyataan 25	0,941	0,279	Valid
Pernyataan 26	0,899	0,279	Valid
Pernyataan 27	0,368	0,279	Valid
Pernyataan 28	0,438	0,279	Valid
Pernyataan 29	0,432	0,279	Valid
Pernyataan 30	0,989	0,279	Valid

Sumber: Data Primer Hasil Olahan Komputer SPSS Versi 22 For Windows dan Microsoft Excel, 2017

Hasil pengujian validitas pada tabel di atas diketahui bahwa tidak semua item pada variabel efektivitas program Kartu Indonesia Pintar dinyatakan valid. Pernyataan pada nomor 5 dan 18 dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai r-hitung yang lebih kecil dari r-tabel sehingga item tersebut tidak dimasukkan dalam kuesioner penelitian sesungguhnya.

Tabel 6
Kisi-kisi Instrumen Penelitian Efektivitas Program

Variabel	Aspek	Indikator	Sub Indikator	Butir Soal	
				Positif	Negatif
Efektivitas	Masukan	Ketepatan Sasaran Program	Pengajuan penerima KIP	10, 11	12
			Penetapan penerima KIP	13,14, 15	-
	Proses	Sosialisasi Program	Sosialisasi Program KIP kepada siswa/ortu	7,9	8
			Pengetahuan penerima KIP	1,2,3	-
			Pengetahuan pelaksanaan KIP	4,6	-
	Keluaran	Tujuan Program	Pencairan dana KIP	16,17	-
			Alokasi Penggunaan dana oleh siswa/ ortu	21,22, 24,25, 26,27, 29,30	23, 28
		Pemantauan Program	Monitoring dan evaluasi program	19, 20	-

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji dan mengetahui derajat keajegan suatu alat ukur. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut memberikan hasil yang tetap walaupun dilakukan dalam beberapa kali dalam waktu yang berlainan. Pengujian reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha Cronbach.⁹⁹Kemudian hasil perhitungan koefisien korelasi Alpha Cronbach (r_{11}) diinterpretasikan terhadap koefisien korelasi.

Tabel 7
Tabel Reliability Statistics

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Tinggi
0,80-1,000	Sangat Tinggi

Instrumen dikatakan reliabel jika r hitung dikonsultasikan dengan tabel interpretasi r dengan ketentuan dikatakan reliabel jika r hitung $\geq 0,600$. Artinya instrumen yang memiliki r hitung $\geq 0,600$ memiliki tingkat keajegan yang tinggi. Jika menggunakan SPSS, suatu kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$. Dengan melihat tabel

⁹⁹Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 180.

Reliability Statistics, nilai reliabilitas dan jumlah item pertanyaan dapat terlihat.¹⁰⁰

Setelah dilakukan uji reliabilitas pada masing-masing variabel dengan menggunakan bantuan *SPSS Versi 22 For Windows* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Alpha	Keterangan
Efektifitas Program Kartu Indonesia Pintar	0,805	0,700	Reliabel

Sumber: *Data Primer Hasil Olahan Komputer SPSS Versi 22 For Windows dan Microsof Excel, 2017*

Berdasarkan hasil nilai koefisien *Cronbach's Alpha*, variabel efektivitas program Kartu Indonesia Pintar memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,700. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel efektivitas program Kartu Indonesia Pintar dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas/kehandalan yang baik.

B. Hasil Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji Regresi. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis uji-t.

1. Hasil Statistik Deskriptif

¹⁰⁰Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, *SPSS vs LISREL (Sebuah Pengantar: Aplikasi untuk Riset)* (Jakarta:Salemba Empat, 2011), hlm. 45.

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran setiap variabel yang ada di dalam penelitian. Statistik deskriptif yang disajikan terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi setiap variabel disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9
Statistik Deskriptif

Efektivitas Program KIP	Skor
Mean	92,10
Median	92,00
Mode	96,00
Std. Deviation	3,97
Variance	15,75
Minimum	82,00
Maximum	98,00

Sumber: Data primer diolah, 2017

Hasil deskriptif dari tabel di atas dilihat dari nilai mean (rata-rata) variabel sebesar 92,10 dengan standar deviasi sebesar 3,97. Nilai minimum variabel ini sebesar 82,00 dan nilai maksimumnya sebesar 8,00. Dari data statistik deskriptif tersebut dapat dibuat kategorisasi berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi. Variabel efektivitas program Kartu Indonesia Pintardalam penelitian ini dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sangat baik, baik, cukup, dan buruk. Hasil kategori tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10
Kategorisasi Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	$X > 91,0$	Sangat Baik	85	58,2%
2	$77,0 < X \leq 91,0$	Baik	61	41,8%
3	$63,0 < X \leq 77,0$	Cukup	0	0,0%
4	$X \leq 63,0$	Buruk	0	0,0%
Jumlah			146	100,0%

Berdasarkan hasil kategorisasi pada tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas respon menilai bahwa efektivitas program Kartu Indonesia Pintar sangat baik yaitu sebanyak 85 orang (58,2%) dan sisanya menilai bahwa efektivitas program Kartu Indonesia Pintar termasuk dalam kategori baik yaitu sebanyak 61 orang (41,8%).

2. Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Uji normalitas menjadi hal penting karena salah satu syarat pengujian statistik parametrik adalah data harus berdistribusi normal. Hasil uji normalitas variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
Efektivitas Program KIP	1,244	0,091	Normal

Sumber: Data Primer Hasil Olahan Komputer SPSS Versi 22 For Windows dan Microsoft Excel, 2017

Berdasarkan hasil pada tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas program Kartu Indonesia Pintar berdistribusi normal.

3. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk menguji efektivitas program kartu indonesia pintar bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Analisis yang digunakan adalah uji t. Berdasarkan estimasi regresi berganda dengan program SPSS 22.0 diperoleh hasil seperti tabel berikut ini:

Tabel 12
Hasil Uji-t

Variabel	Rata-rata	t Hitung	Sig.	Keterangan
Efektivitas Program KIP	92,10	41,723	0,000	Ada beda
Test Value = 78,4				

Sumber: Data Primer Hasil Olahan Komputer SPSS Versi 22 For Windows dan Microsoft Excel, 2017

Berdasarkan pada tabel di atas dilihat bahwa dengan nilai test value 78,4 (70% dari skor maksimal yaitu 112) diperoleh nilai t hitung sebesar 41,723 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara variabel efektivitas program KIP dengan test value yang ditentukan. Nilai rata-rata sebesar 92,10 lebih besar dari test value berarti bahwa program KIP efektif. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas Program Kartu Indonesia Pintar bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten

Cilacap lebih dari 70%, maka H_0 yang berbunyi Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap lebih kecil atau sama dengan 70% ditolak dan H_a yang berbunyi Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap lebih dari 70% diterima.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektifitas program kartu indonesia pintar bagi siswa smk di kecamatan jeruklegi kabupaten cilacap lebih dari 70%. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata sebesar 92,10 yang lebih besar dari 78,4 dan hasil uji t yang memiliki signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sekhul Islam dengan penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas Bantuan Siswa Miskin (BSM) dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa sesudah mendapatkan bantuan siswa miskin lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi belajar sebelumnya yang berarti bantuan siswa miskin efektif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera

(KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan.

1. Pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja.

Kartu Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah.

Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak- anak miskin yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. Pengalokasian dana bantuan

ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain- lain.

Penerima Kartu Indonesia Pintar adalah siswa yang berasal dari keluarga yang dalam hal pembiayaan pendidikan masih dalam taraf kurang terpenuhi. Dengan adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan untuk bisa mensejahterakan siswa agar dapat berkembang seperti halnya dalam kekurangan uang saku maka siswa dapat terpenuhi uang sakunya dan kekurangan pada alat sekolah juga dapat terpenuhi.

Bantuan Kartu Indonesia Pintar diprioritaskan untuk siswa miskin, siswa yang bersekolah ataupun yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah dengan adanya bantuan tersebut. Bantuan berupa uang tunai agar dapat digunakan siswa untuk membeli peralatan sekolah termasuk biaya transportasi mereka ke sekolah. Sehingga pendidikan mereka dapat layak dan terjamin serta tidak ada lagi adanya siswa yang tidak bersekolah dengan alasan tidak ada biaya pendidikan.

Orang tua siswa dari keluarga yang kurang mampu sangat merasa beruntung dengan adanya bantuan Kartu Indonesia Pintar, karena dapat membantu kekurangan mereka dalam membiayai anak- anak sekolah. Orang tua juga mengetahui kegunaan dari dana tersebut adalah untuk membeli alat- alat sekolah dan biaya transportasi ke sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kartu Indonesia Pintar bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap diberikan

kepada siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu dalam keadaan sehari-harinya dan dalam membiayai anak-anak mereka masih kekurangan. Pemanfaatannya dari Kartu Indonesia Pintar untuk pembelian buku dan alat tulis sekolah, seragam sekolah, transportasi siswa ke sekolah, uang saku siswa, serta biaya les tambahan siswa.

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program kebijakan Kartu Indonesia Pintar bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Pelaksanaan suatu program tentunya ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program kebijakan Kartu Indonesia Pintar bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung penelitian terhadap pelaksanaan program kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap memiliki beberapa poin penting terkait dengan faktor yang mendukung pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik. Berikut beberapa hal yang penting mengenai faktor pendukung keberhasilan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap:

- 1) Adanya informasi yang diberikan pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online membuka informasi 24 jam. Informasi tersebut mengenai buku panduan, edaran, maupun melalui sosialisasi secara

lisan. Walaupun dengan adanya informasi tersebut pihak pelaksana kebijakan di sekolah juga masih kurang memahami kebijakan dengan baik.

- 2) Keputusan dari pihak pemerintah pusat untuk menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berisi informasi yang mengidentifikasi nama anak, usia, dan alamat rumah tinggal dari pendataan Program Perlindungan Sosial sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) membantu pemerintah mendapatkan data mengenai keluarga yang miskin dengan lebih tepat dan akurat.
- 3) Adanya rasa saling percaya terhadap penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar dari siswa dan orang tua, serta sekolah meskipun tidak adanya pengumpulan bukti berupa kuitansi pengeluaran siswa. Hal tersebut diperkuat dari peneliti saat wawancara dengan orang tua siswa, yang mengaku bahwa uang tersebut memang digunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya.
- 4) Siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi sehingga tidak merasa tertinggal dengan temantemannya.

b. Faktor penghambat

Peneliti juga telah mendapatkan beberapa poin penting yang menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Berikut faktor penghambat implementasi kebijakan program Kartu

Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap:

- 1) Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan khususnya pada mekanismenya. Hal tersebut mengakibatkan para pelaksana untuk terus melakukan pemahaman terhadap mekanisme baru setiap periodenya, sehingga pelaksana program terkadang merasa kebingungan dengan adanya mekanisme baru.
- 2) Ketika siswa sudah memperoleh dana Kartu Indonesia Pintar, mereka bisa lupa bahwa dana tersebut untuk biaya pendidikan bukan untuk membeli kebutuhan lain yang tidak ada kepentingannya dengan sekolah.
- 3) Kesulitan dalam mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah digunakan oleh siswa. Sehingga sekolah terpaksa juga tidak membuat laporan penggunaan dana tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Efektifitas program kartu indonesia pintar bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap lebih dari 70%. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata sebesar 92,10 yang lebih besar dari 78,4 dan hasil uji t yang memiliki signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.
2. Kartu Indonesia Pintar bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap diberikan kepada siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu dalam keadaan sehari-harinya dan dalam membiayai anak-anak mereka masih kekurangan. Pemanfaatannya dari Kartu Indonesia Pintar untuk pembelian buku dan alat tulis sekolah, seragam sekolah, transportasi siswa ke sekolah, uang saku siswa, serta biaya les tambahan siswa.
3. Faktor pendukung implementasi KIP: informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online, Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima KIP, adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana KIP, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi. Faktor penghambat: evaluasi program KIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya

pada mekanismenya, Penyelewengan dana KIP, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian dan beragam informasi yang telah diperoleh, maka dari hasil kajian penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Bagi pemerintah, diharapkan mekanisme yang berubah disetiap periodenya diikuti dengan sosialisasi yang jelas agar semua pihak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pemerintah seharusnya membentuk tim monitoring Kartu Indonesia Pintar (KIP), karena menurut hasil dari wawancara peneliti menjelaskan bahwa dari pihak sekolah maupun dinas tidak ada monitoring. Kemudian pemerintah hendaknya lebih memberikan kewenangan yang luas kepada pihak sekolah agar turut berperan aktif dalam mengambil keputusan kebijakan Kartu Indonesia Pintar.
2. Bagi sekolah
 - a. Sekolah diharapkan dalam memberikan dana KIP tidak hanya siswa saja yang menerima, namun juga turut mengundang orang tua siswa agar dapat menyaksikan bahwa anak mereka mendapatkan dana KIP. Meskipun sekolah sudah percaya dengan siswa, namun alangkah lebih baik apabila orang tua juga turut diundang.
 - b. Sekolah diharapkan dapat terus mengelola data, arsip atau dokumen sekolah dan selalu menyiapkan backup data. Sehingga apabila suatu saat

ditanyakan oleh peneliti atau pihak pelaksana kebijakan, sekolah dapat mempertanggungjawabkan tugas mereka.

3. Peneliti Selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel sehingga menjadi lebih besar dan dapat mencakup seluruh elemen dari populasi secara seimbang, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan hasil dapat digeneralisasikan lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2010. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrudin. 2013. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Budiani, Ni Wayan. 2007. "Efektivitas program penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial Volume 2 Nomor 1, Bali: Universitas Udayana.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. 2014. *Kebijakan Program dan Anggaran Pendidikan Menengah Tahun 2015*. Jakarta: DIRJENDIKMEN.
- Esnawati, Sri. 2014. *Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Pelajaran 2012/2013 di SMP Negeri 15 Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi. Yogyakarta: UNY.
- Fathurrohman, Muhammad & Sulistyorini. 2012. *Meretas Pendidikan Berkualitas dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Gunawan, Muhammad Ali. 2015. *Statistik Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi, dan Sosial*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Handayani, Suwarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasbullah, M. 2015. *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hermiono, Agustinus. 2014. *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Houghton, Jonathan & Khander. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan* Jakarta: Salemba Empat.

- Islam, Muhammad Sekhul. 2011. *Efektivitas Bantuan Siswa Miskin (BSM) dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa MTs Al Muawanah Harjawinangun Balapulang Tegal Tahun Pelajaran 2010/ 2011*, Skripsi. Tegal: Universitas Pancasakti.
- Iqbal, Hasbi. 2008. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupten Kudus*, Tesis. Semarang: UNDIP.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*. 2015. Jakarta: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
- Liliweri, Alo. 1997. *Sosiologi Organisasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Skunder*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mulyasa, E. 2009. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munadi, Muhammad & Barnawi. 2011. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Nazir, Moh. 2005. *metode penelitian*. Bogor : ghalia indonesia.
- Nuh, Mohamad. 2013. *Menyemai Kreator Peradaban; Renungan Tentang Pendidikan, Agama, dan Budaya*. Jakarta: Zaman.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.
- Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- Prasetya, Bambang & Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Prasetya, Irawan. 2006. *Metodologi Penelitian Administrasi; Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

- Ramadhan, Ghafuur Kharisma. 2014. *Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar di Kecamatan Sambas*, Skripsi. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- R. A, Supriyono. 2008. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPF E.
- Rohman, Arif. 2009. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sagala, Syaiful. 2009. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Salim, Emil. 1996. *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar: Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saroni, Muhammad. 2013. *Pendidikan Untuk Orang Miskin; Membuka Keran Keadilan dalam Kesempatan Berpendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Siswoyo, Dwi dkk. 2011. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktek Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- S, Sukanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Usman, Husaini. 2006. *Manajemen: Teori, Praktek dan Research Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widiastuti, Rini. 2011. *Evaluasi Terhadap Program CSR Pertamina dalam Rangka Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di SDNegeri 1, 2 dan 3 Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten Blora*, Skripsi. Semarang: UNNES.
- Yusuf, Amir Abadi. 1994. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat.

<https://cilacapkab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/166>

<https://www.bps.go.id>

www.tnp2k.go.id

